

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abas. (2017) *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal*. Lontar Mediatama: Depok.
- Abd Halim. (2014). *“Politik Lokal Pola Aktor dan Alur Dramatikalnya”*. LP2B: Yogyakarta.
- Babadu dan Zain. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Dede Selamat Permana, Dkk (2020). *Wajah Pesta Demokrasi Di Masa Pandemi*. Bawaslu Kota Depok; Depok.
- Defny Holidin. (2013). *Reformasi Birokrasi Dalam Praktik*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi: Jakarta.
- Dwiyanto. (2015). *Reformasi Birokrasi Konstektual*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Feisal Tamin. (2004). *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*. Belantika: Jakarta.
- Hugiono dan Perwantana. (2020). *Pengantar Ilmu Sejarah*. PT Bina Aksara : Jakarta.
- Imam Hidayat. (2009). *Teori-Teori Politik*. Setara Press: Malang.
- Miftah Thoha, (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Miftah Thoha (2014). *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Kencana: Jakarta.
- Miriam Budiardjo. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Peneltiian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mudji Sutrisno. (2000). *Demokrasi*. Kanisius: Yogyakarta.
- Mufti, Muslim. (2013). *Teori-Teori Politik*. CV. PUSTAKA SETIA: Bandung.
- Muhamad. (2018). *Birokrasi Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance*. Unimal Press: Sulawesi.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana: Jakarta.
- Sorensen. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Syahrum, Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media: Bandung.

Yoyoh Rohaniah. (2015). *Pengantar Ilmu Politik : Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Intrans: Malang

Yudi R sufiana, Cahya Supriatna, (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*. Alfabeta: Bandung.

## **Jurnal**

Ardenolis, Dkk. (2020). *Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 13 No. 2.

Bainus, Dkk. (2022). *Pemanfaatan Modal Sosial Pasangan Idris-Imam dalam Pemenangan Pemilihan Walikota Depok Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 2.

Aswin Eka Adhi, Herman, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol. 3 No. 1.

Dharmaningtiyas, Dewi. (2020). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada*. Jurnal Bidang Politik Dalam Negeri Vol. XII. No.17.

Fatimah, Siti. (2018) *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik*. Jurnal Sosial Politik Vol. 1 No. 1.

Muhyanto, Dkk. (2017). *Analisis Teori Otoritas Max Webber dalam Kepemimpinan Dukun Adat di Masyarakat Suku Tengger*. Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant. Vol. 8 No. 1.

Gunawan, H, Santosa, C. (2021). *Politik Organisasi Dan Dampaknya Terhadap Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja, Kinerja Dan Organizational Citizenship Behavior (OCB)*. Jurnal Manajemen Vol. 12 No. 1.

Lestari, Anak. (2020) *Pengaturan Birokrasi Aparatur Sipil Negara Yang Netral dan Bebas dari Intervensi Politik*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No. 12.

Ristian, Andre. (2016). *Demokrasi dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent*. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol. 1 No. 1.

Suswanta, M. Rafi. (2021). *Pilkada Era Pandemi: Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Zainul. (2017). *Netralitas KPU Provinsi DKI Jakarta pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*. Jurnal Ilmu dan Budaya Vol. 41 No. 65.

## Internet

- “Kota Administratif Depok”. Depok.Go.Id. <https://www.depok.go.id/sejarah>. Diakses Pada 1 Januari 2023.
- “Kota Depok”. Depok.Go.Id. <https://www.depok.go.id/geografi>. Diakses Pada 1 Januari 2023.
- “Imam Budi Hartono”. Depok.Go.Id. <https://www.depok.go.id/pimpinan-daerah>. Diakses pada 24 Januari 2022.
- Bernadetha Aurelia Oktavira. (2020). “*Bentuk Kampanye Pilkada yang Dilarang di Tengah Pandemi COVID-19*”. Hukum Online. 1 Oktober.
- Detiknews. (2005). “*Pilkada Depok Masih Sepi Pemilih, Dubes AS Meninjau*”. Diakses pada 3 Januari 2023.
- Duniapcoid. (2022). “*Asal Usul Kota Depok*”. Dunia Pendidikan. Diakses pada 31 Desember 2022.
- Dwi Erianto. (2022). “*Wali Kota Depok Mohammad Idris*”. Kompas.Id. Diakses pada Tanggal 24 Januari 2023.
- [Http://vkpsdm.malangkab.go.id](http://vkpsdm.malangkab.go.id). Diakses pada 6 Januari 2023.
- Kurnia Azizah. “*Fungsi Organisasi, Pengertian dan Tujuan hingga Jenisnya yang wajib diketahui*”. [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) Diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.
- Said. (2020). “*Terkait Pertemuan Idris BK, Supian Suri Terancam Kena Sanksi*”. Diakses pada 10 Januari 2023.
- Sayap Bening. (2021). “*Jenis Pelanggaran Pemilu*”. Bantuan Hukum. Diakses pada 6 Januari 2023
- Septianan Dwiputrianti, Imade Suwandi, Irwansyah. (2017). “*Netralitas ASN di Tengah Intervensi Politik*”. KASN.
- Verihubs. (2022). “*Digitalisasi adalah Proses Fundamental di Era Modern*”. Diakses pada 3 Januari 2023
- Vini Rizki Amelia. (2020). “*Bawaslu Kota Depok Serahkan Kasus Supian Suri yang diduga Terlibat Politik Ke Komisi ASN*”. Diakses pada 10 Januari 2023.
- Wahyu Adityo Prodjo. (2020). “*Kampanye Politik di Masa Pandemi, Pasangan Idris-Imam Optimalkan Platform Online*”. Megapolitan Kompas. Diakses pada 27 September 2022.
- Zaenun, M. (2021). “*Arti Netralitas ASN dalam Pemilu*”. [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

## Peraturan Perundang-undangan

*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012*

*Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021*

*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020*

*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017.*

*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018.*



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### **Pedoman Wawancara**

#### **Pedoman Wawancara Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Depok**

| <b>No.</b> | <b>Pertanyaan</b>   |
|------------|---|
| 1.         | Bagaimana dinamika yang terjadi dari sisi Masyarakat selaku audiens selama pra, hari pelaksana ataupun pasca dari PILWAKOT KOTA DEPOK 2020?   |
| 2.         | Bagaimana dinamika yang terjadi dari sisi Pasangan Calon selama pra, hari pelaksana ataupun pasca dari PILWAKOT KOTA DEPOK 2020?  |
| 3.         | Berdasarkan data sari sebuah Literatur, Keberlangsungan PILKADA SERENTAK 2020 terdapat pelanggaran-pelanggaran, yang tertinggi ialah ada Kasus Ketidaknetralitas ASN. Lantas, Apakah ada pelanggaran ASN dalam hal Netralitas pada PILKADA KOTA DEPOK 2020?   |
| 4.         | Berdasarkan data yang beredar di platform informasi digital, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Depok terdapat melakukan Pelanggaran Netralitasnya berbentuk mengikuti kampanye selama PILWAKOT KOTA DEPOK 2020. Kemudian, Apa yang menjadi motif dari KABAN tersebut melakukan ketidaknetralisan selama PILWAKOT KOTA DEPOK 2020? |
| 5.         | Mengingat paslon dari PILWAKOT KOTA DEPOK 2020 terdapat Incumbent, Apakah hal tersebut menjadi pengaruh dalam kasus Netralitas ASN pada PILKADA KOTA DEPOK 2020?  |

|    |  |
|----|--|
| 6. | Apa yang dilakukan Bawaslu ketika mendapatkan laporan tersebut pada pra, hari pelaksanaan dan pasca PILWAKOT KOTA DEPOK 2020                   |
| 7. | Apa Peran dari Bawaslu selaku badan Pengawas Pemilu dalam hal menjaga atau mempertahankan Marwah Netralitas ASN pada PILWAKOT KOTA DEPOK 2020? |



## Pedoman Wawancara Wakil Direktur Advokasi dan Hukum Tim Sukses

### Pradi Supriatna – Afifah Alia

| No. | Pertanyaan  |
|-----|---|
| 1.  | Sebagai tim sukses Pradi-Afifah, bagaimana melihat dinamika yang terjadi? Jika dilihat, antara Pak Idris maupun Pak Pradi merupakan bagian dari Petahana.   |
| 2.  | Apakah Pak Pradi sebagai bagian dari Petahana memiliki previllage sendiri dalam pencalonan dirinya?   |
| 3.  | Jika iya, apakah bisa dijelaskan? Jika tidak, apakah kekuasaan yang dimiliki itu hanya menjadi previllage dari Pasangan Idris-Imam?   |
| 4.  | Berdasarkan kasus yang ditemui, terdapat KABAN BKPSDM yang mengikuti kampanye salah satu pasangan calon yaitu Idris-Imam, apa motif dari fenomena itu terjadi? Apakah poin Incumbent inilah yang menjadi faktor utama hal tersebut terjadi? |
| 5.  | Berangkat dari temuan diatas, Lantas apakah ada temuan lain dari sisi Timses Pradi-Afifah terkait kasus ketidaknetralisan ASN yang dilakukan Pasangan Idris - Imam?   |
| 6.  | Semisal ada, apakah tim sukses Pradi-Afifah melakukan semacam pelaporan atau penggugatan terkait ketidaknetralisan ASN yang dilakukan oleh pasangan Idris-Imam?   |

**Pedoman Wawancara Sekretaris Jendral Komite Independent Pemantau  
Pemilu (KIPP) Kota Depok**

| No. | Pertanyaan   |
|-----|--|
| 1.  | Bagaimana dinamika yang terjadi dari sisi Masyarakat selaku audiens selama pra, hari pelaksana ataupun pasca dari PILWAKOT KOTA DEPOK 2020?  |
| 2.  | Bagaimana dinamika yang terjadi dari sisi Pasangan Calon selama pra, hari pelaksana ataupun pasca dari PILWAKOT KOTA DEPOK 2020? terlebih para Pasangan Calon merupakan Petahana.  |
| 3.  | Berdasarkan data dari sebuah Literatur, Keberlangsungan PILKADA SERENTAK 2020 terdapat pelanggaran-pelanggaran, yang tertinggi ialah ada Kasus Ketidaknetralitas ASN. Lantas, Apakah ada pelanggaran ASN dalam hal Netralitas pada PILWAKOT KOTA DEPOK 2020?   |
| 4.  | Berdasarkan data yang beredar di platform informasi digital, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Depok terdapat melakukan Pelanggaran Netralitasnya berbentuk mengikuti kampanye selama PILWAKOT KOTA DEPOK 2020. Kemudian, Apa yang menjadi motif dari KABAN tersebut melakukan ketidaknetalisan selama PILWAKOT KOTA DEPOK 2020?   |
| 5.  | Berhubungan dengan Para Pasangan Calon yang merupakan Petahana. Seperti yang kita ketahui pula, seorang Petahana mempunyai sebuah previllage atau kelebihan dalam Kontestasi Politik, namun tidak dipungkiri pula terdapat peluang-peluang untuk melakukan penyelewengan previllage tersebut. Apakah kondisi ini yang menjadi faktor utama dari Kasus Ketidaknetralitas ASN pada Pilwakot Kota Depok 2020? |
| 6.  | Selaku Organisasi Pemantau Pemilu, apakah pernah mendapati kasus Ketidaknetralisan ASN lainnya pada Pilwakot Kota Depok 2020?  |



|    |  |
|----|--|
| 7. | Semisal ada, Apa yang dilakukan KIPP dalam merespon Pelanggaran tersebut?  |
| 8. | Berdasarkan berbagai keuntungan yang didapati oleh Petahana, apakah ia menjadi sangat berpengaruh kepada Aparatur Sipil Negara selaku elemen yang ia bawahi ini? |
| 9. | Sebagai lembaga Pemantau dari Pilwakot Kota Depok ini, tapi apakah KIPP ini sempat berkontribusi dalam menjaga Marwah dari Netralitas ASN?                       |



**Data Informan**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Nama</b>              | <b>Willi Sumarlin, S.H.</b>  |
| <b>Jabatan</b>           | <b>Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran,<br/>Data dan Informasi Bawaslu Kota Depok</b> |
| <b>Tanggal Wawamcara</b> | <b>Kamis, 29 Desember 2022</b>   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Nama</b>              | <b>Mochamad Fajri</b>  |
| <b>Jabatan</b>           | <b>Wakil Direktur Bidang Advokasi Hukum Tim<br/>Sukses Pradi Supriatna – Afifah Alia</b> |
| <b>Tanggal Wawamcara</b> | <b>Jumat, 30 Desember 2022</b>   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Nama</b>              | <b>Wahyu Dwi Triyanto, S.Sos.</b>  |
| <b>Jabatan</b>           | <b>Sekretaris Jendral Komite Independent<br/>Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Depok</b> |
| <b>Tanggal Wawamcara</b> | <b>Sabtu, 21 Januari 2023</b>  |

### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara

Subjek : Willi Sumarlin, S.H.

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022

Lokasi : Kantor Bawaslu Kota Depok

| No. | Pertanyaan  | Jawaban  |
|-----|---|--|
| 1.  | Bagaimana dinamika yang terjadi dari sisi Masyarakat selaku audiens selama pra, hari pelaksana ataupun pasca dari PILWAKOT KOTA DEPOK 2020? | Secara umum masyarakat Depok cukup antusias ya dalam menyambut pelaksanaan Pilkada, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pada Pelaksananya mereka, mampu menerima siapa yang menjadi pemenang dengan tidak adanya kerusahan dan lainnya, Pilkada berjalan dengan damai. Jadi meskipun ada sifatnya di media sosial begitu ramai tetapi yang dilapangkan tidak sampai terjadi benturan. Nah pada saat pelaksanaan juga seperti itu, mereka berpartisipasi, tingkat partisipasi juga cukup tinggi, kemudian, setelah pelaksanaan pilkada, siapapun yang terpilih mereka (masyarakat) menerima. Dengan tidak adanya gugatan oleh pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. |
| 2.  | Bagaimana dinamika yang terjadi dari sisi Pasangan Calon selama pra, hari pelaksana ataupun pasca dari                                      | Nah sesama Pasangan calon, tentu mereka mengkampanyekan program yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon. Baik itu pasangan calon nomor 1 ataupun nomor 2. Nah pada awal-awal ini sempat ada tudingan-tudingan yang diarahkan oleh salah satu kandidat yang perempuan   |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           | <p>PILWAKOT KOTA DEPOK 2020?</p>   | <p>(Afifah Alia). Nah tetapi kemudian itu tidak sampai berkembang lebih lanjut seperti itu. Tudingan tersebut merasa dilecehkan pada saat dia mengikuti tes Kesehatan atau gimana, tapi itu bukan seperti itu ya. Karena hanya sekilas-sekilas saja. Saya juga tidak mengerti.</p>  |
| <p>3.</p> | <p>Berdasarkan data sari sebuah Literatur, Keberlangsungan PILKADA SERENTAK 2020 terdapat pelanggaran-pelanggaran, yang tertinggi ialah ada Kasus Ketidaknetralitas ASN. Lantas, Apakah ada pelanggaran ASN dalam hal Netralitas pada PILKWAKOT KOTA DEPOK 2020?</p> | <p>Di Pilkada 2020 ini terdapat 8, ada 4 laporan dan 4 temuan dari laporan tersebut ada 2 yang tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat laporan. Kita setelah pelaporan kita minta melengkapi, dia tidak bisa melengkapi sehingga tidak bisa kita register menjadi sebuah laporan. Dan dari 6 tersebut Sudah kita teruskan ke KASN, nah 5 kita teruskan ke KASN dan yang satu ini kita teruskan ke Sentra Gakkumdu juga. Dimana pada saat itu ASN datang pada saat kampanye yang dihadari oleh Incumbent. Dan untuk yang lain itu sifatnya foto yang menunjukkan gestyr ataupun simbol-simbil tanpa kehadiran calon yang lain.</p> |
| <p>4.</p> | <p>Berdasarkan data yang beredar di platform informasi digital, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Depok terdapat melakukan Pelanggaran Netralitasnya berbentuk mengikuti kampanye selama PILWAKOT</p>  | <p>Karena pada waktu itu dugaan pelanggaran ini bersifat pelanggaran hukum lainnya, jadi kita berdasarkan perBawaslu yang baru itu tidak bisa melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan tetapi pelanggaran tersebut kita teruskan ke KASN, sehingga tidak menanyakan motif itu, tetapi karena dugaan pelanggaran ini mengangkut kepada netralitas ASNm sudah kita tersukan kepada KASN dan sudah ditindaklanjuti oleh KASN dengan adanya rekomentasi pelanggaran Netralitas ASN di surat</p>   |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           | <p>KOTA DEPOK 2020. Kemudian, Apa yang menjadi motif dari KABAN tersebut melakukan ketidaknetalisan selama PILWAKOT KOTA DEPOK 2020?</p>                                 | <p>nomor R511/KASN/01/2021. Yang ditujukan kepada Walikota Depok selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Kalo motifnya memang kita tidak menanyakan langsung, dikarenakan Ketika pelanggaran itu bersifat pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini adalah netralitas ASN. Kita sifatnya hanya meneruskan ke KASN.</p> <p>Nah jadi terkait tadi yang disampaikan. Apa namanya, proses dugaan pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu ASN, dia ikut mengantar bakal calon peserta untuk meminta restu kepada mantan Walikota. Nah proses itu sudah kita tangani dan sudah kita rekomendasikan kepada KASN. Secara ini, kemudian, Sudah ditindaklanjuti berupa rekomendasi dari KASN yang ditujukan kepada Walikota Depok selaku pejabat Pembina kepegawaian. Nah itu sudah ditindaklanjuti oleh KASN dengan rekomendasi pelanggaran Netralitas ASN surat nomor R511/KASN/01/2021.</p> |
| <p>5.</p> | <p>Mengingat paslon dari PILWAKOT KOTA DEPOK 2020 terdapat Incumbent, Apakah hal tersebut menjadi pengaruh dalam kasus Netralitas ASN pada PILWAKOT KOTA DEPOK 2020?</p> | <p>Nah kalo secara langsung pengaruh Incumbent itu kita tidak menemukannya ya. Karena hanya dari beberapa pelanggaran ASN itu, itu hanya satu yang dihadapi Incumbent, dan itu sudah kita teruskan ke Sentra Gakkumdu. Dimana pada saat itu ASN datang pada saat kampanye yang dihadapi oleh Incumbent. Dan untuk yang lain itu sifatnya hanya foto yang menunjukkan gestur ataupun simbol-simbol tanpa kehadiran pasangan calon yang lain. Sehingga pada pengaruh incumbent, ya sangat berpengaruh, meraka kan ingin menunjukkan loyalitasnya kepada</p>   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | incumbent sehingga harapannya mungkin Ketika incumbent ini terpilih, itu mereka punya dasar bahwa saya mendukung loh nah seperti itu. Tapi itu ya tidak ada ininya secara langsung tetapi secara tersirat.  |
| 6. | Apa yang dilakukan Bawaslu ketika mendapatkan laporan tersebut pada pra, hari pelaksanaan dan pasca PILWAKOT KOTA DEPOK 2020                   | Nah didalam sebuah peristiwa laporan atau temuan. Nah itu kan Bawaslu melakukan kajian, nah berdasarkan kajian ini nanti, kita pilah lagi apakah ini merupakan pelanggaran netralitas ASN ataukah ada unsur pidana. Dari 6 pelanggaran itu hanya 1 yang berkaitan dengan pidana dan sudah kita teruskan ke tim Sentra Gakkumdu sudah diproses dan sampai ke Pengadilan itu mendapatkan sanksi denda 4 juta subsider 2 bulan penjara itu ibaratnya gitu. Nah kalo itu sifatnya hanya pelanggaran netralitas ASN, itu masuk kepada kategori pelanggaran hukum lainnya, sehingga Bawaslu tidak berwenang menangani hal tersebut. maka Bawaslu meneruskan pelanggaran Netralitas ASN tersebut kepada KASN untuk memproses pelanggaran terkait netralitas ASN. |
| 7. | Apa Peran dari Bawaslu selaku badan Pengawas Pemilu dalam hal menjaga atau mempertahankan Marwah Netralitas ASN pada PILWAKOT KOTA DEPOK 2020? | Untuk menjaga marwah netralitas ASN, Bawaslu melakukan sosialisasi kepada ASN, baik itu berupa himbauan. Kita pernah menyampaikan himbauan Walikota untuk tidak melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum dan setelah walikota terpilih. Nah itu merupakan salah satu himbauan. Nah kemudian juga kita melakukan sosialisasi kepada para ASN baik itu ditingkat kabupaten/kota maupun ditingkat kelurahan ya maksudnya ditingkat kecamatan itu kita melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN,  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>nah itu beberapa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota untuk menjaga terkait netralitas ASN. Nah, ya karena kemarin kan terbatas (adanya Pandemic). Melakukan sosialisasi melalui daring juga melalui pertemuan tatap muka tapi sifatnya terbatas. Nah para peserta cukup antusias ya terkait dengan sosialisasi tersebut. dengan adanya pertanyaan-pertanyaan kepada kita terkait pelanggaran-pelanggaran seperti apa. Tetapi kan memang tidak semuanya ini ya, mungkin ada beberapa yang belum tahu sehingga meskipun kita sudah melakukan sosialisasi, pelanggaran itu ya tetap masih ada. Itu kan hanya bagian dari upaya pencegahan. Nah Ketika kita sudah melakukan sosialisasi tetapi ada beberapa oknum yang tetap melakukan pelanggaran. Maka, Bawaslu Kota Depok melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. Dalam artian sesuai prosedur.</p> |
|--|---|

## Transkrip Wawancara

Subjek : Mochamad Fajri

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Desember 2022

Lokasi : Di Kediaman Informan

| No. | Pertanyaan   | Jawaban  |
|-----|--|--|
| 1.  | <p>Sebagai tim sukses Pradi-Afifah, bagaimana melihat dinamika yang terjadi? Jika dilihat, antara Pak Idris maupun Pak Pradi merupakan bagian dari Petahana.</p> | <p>Terkait dinamika yang terjadi, sepengetahuan saya, Pak Idris dan Pak Pradi pada saat kontestasi Pilwakot itu lumayan kencang tarik menarik kepentingan terutama di posisi ASN yang strategis. Contohnya seperti, Sekda. Dimana pengaruh Sekda sangat kuat. Sekda ini merupakan orang nomor 2 dalam Pemerintah Kota. Ya karena pada dasarnya birokrasi yang ada di Kota Depok, memang bersifat hierarkis. Lalu, PUPR, kenapa PUPR, dikarenakan PUPR ini memiliki anggaran yang sangat besar untuk disalurkan kepada masyarakat melalui pembangunan. Sedangkan dari sisi kepartaian, sepengetahuan saya dari informasi yang saya dapat. Pradi itu sebenarnya masih mau menjadi wakilnya dari Pak Idris. Namun kenapa PKS tidak mau, biar bagaimanapun Depok ini adalah tempat dia lahir (PKS) kalo tidak salah dulu Namanya Partai Keadilan tidak ada sejahteranya. PKS berdiri di Depok, sumber sumber kader intelektual organiknya ada di UI Depok, lalu yang ketiga jenjang kaderisasi PKS ini sangat jelas, sangat bagus atau sangat baik. Karena PKS ini adalah Partai Kader selain PDI Perjuangan. Dimana sistem kadernya sangat terjenjang atau terarah.</p> |



|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | <p>PKS pula saat itu masih belum full main, dimana masih membuka peluang pada calon potensial dari partai lain untuk menjadi wakilnya Pak Idris, tapi dari masing-masing partai seharusnya sudah bisa melihat bahwa itu adalah rayuan kosong. Kenapa begitu, PKS di tahun 2015 itu kursi di DPRD hanya 5. Dia harus koalisi dengan partai lain, untuk mencalonkan Walikota dan menang. Pada tahun 2020, kursi PKS terdapat 12 kursi, jadi orang-orang atau semua orang berasumsi atau beranalisa, PKS hanya memainkan taktik politik mengakomodir, padahal engga. Kita tahu pada ujungnya mereka bakal All out untuk calonnya sendiri dua-duanya, seperti IBH, IBH kan ketua DPD PKS Depok. IBH itu juga karis, 2 periode Depok, 2 periode Provinsi, turun jadi Wakil Walikota. Besok walikota. Nah jenjang kaderisasi tersebut yang nantinya akan menciptakan hasil dari seleksi kepemimpinan di Partai. Kan salahsatu fungsi partai itu kan ada seleksi kepemimpinan, Pendidikan politik dan lainnya.</p> <p>Sehingga pada dinamikanya, akhir Pradi mungkin membaca itu dan hubungannya jadi ga baik-baik saja.</p> |
| 2. | <p>Apakah Pak Pradi sebagai bagian dari Petahana memiliki previllage sendiri dalam pencalonan dirinya?</p> | <p>Sudah pasti mereka menggunakan previllegennya, Idris Walikota dan Wakilnya itu Pradi kemarin, itu sudah pasti mereka ploating cari-cari bagi-bagi dinas termasuk proyek. Intinya PKS itu di Depok menguasai proyek pengadaan barang. Nah itu kan dibawah supervisi ataupun kordinasi dinas-dinasi terkait kan. Nah kalo bicara keistimewaan</p>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>Pradi mempunyai itu. Dan Pradi pun ada beberapa RW yang dia pegang sebenarnya.</p> <p>Kalo memiliki Previllege sudah pasti. Ditambah ia incumbent, kenapa incumbent disebut mempunyai keistimewaan. Pertama, ia menguasai OPD/Dinas-Dinas karena sumber uang disitulah. Kedua, ia sudah dikenal dikalangan masyarakat secara public image. Ketiga, dia selama SKnya belum habis masih bisa memberikan instruksi kepada OPD ataupun bawahannya ya kan. Cuma kayanya pradi tuh saat itu kalah set jumlah sama PKS.</p>  |
| 3. | <p>Jika iya, apakah bisa dijelaskan? Jika tidak, apakah kekuasaan yang dimiliki itu hanya menjadi previllage dari Pasangan Idris-Imam?</p> | <p>Jadi lebih banyak yang diuntungkan itu dari sisi calon Idris? Memang iya, kalo semisalkan ini pradi mau visit dari sini ke sawangan dia menggunakan Rider, itu previllage bukan? Ya Previllage. Setau gini setau yang ASN itu kepecah 2 eh 3. Satu ke walikota, Idris Afifah dan satu lagi Netral. Tapi memang jumlah semisal kita kalkulasikan memang lebih banyak yang ke idris, kepentinganya apa? Yang pertama naik jabatan. Yang kedua uang. Tidak jauh-jauh. Ada ga relasi kuasanya? Ya ada. Karena yang memilih langsung camat, lurah sama dengan yang diatas dinas atau segala macam itu langsung dari Walikota. Gua si gatau si ini terjadinya diawal atau diakhir, kalo diawal kan otomatis ada janji “bro, nanti lu bantu gua, nanti lu gua kasih jabatan ini ya”. Kalo diakhirkan ga gitu, ya kalo di akhir, ya lo kerja dulu ya kan, nanti kerja lu oke. Nanti baru dapat jabatan.</p> |
| 4. | <p>Berdasarkan kasus yang ditemui, terdapat KABAN BKPSDM</p>   | <p>Untuk kasus netralitas, itu saja yang masa kampanye ini. Pimpinan tertinggi Pemerintahan Kota adalah Walikota dan Seorang walikota bisa membawahi belasan dari</p>  |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           | <p>yang mengikuti kampanye salah satu pasangan calon yaitu Idris-Imam, apa motif dari fenomena itu terjadi? Apakah poin Incumbent inilah yang menjadi faktor utama hal tersebut terjadi?</p> | <p>OPD/Kedinasan. Pertanyaan saya yang nunjuk-nunjuk yang memilih menjadi kepala dinas itu siapa? Iya Idris itu sendiri, ya otomatis orang-orang dia yang dipilih, kan gamungkin fraksi yang Pradi kan. Saya punya teman pejabat Namanya Abra. Abra ini dulu adalah sekretaris kecamatan cilodong. Jadi pada kampanye di aini lagi pegang lurah atau camat gitu. Selesai kampanye naik menjadi Kabag atau Kadis di Disporyata. Maksudnya terkait hal timbal balik itu bisa diakhir atau diawal. Jadi pasti ada relasi kuasa. Yang atas itu meminta bantuan ke bawah kenapa karena dia butuh pasukan. Kan gini Dinas itu kan memang data. Seperti dinas Kesehatan, orang sakit kan pasti pergi kedokter kan, dinas itu tinggal telpon atau meminta data atau Tarik data dong. Jadi ada relasi kuasa.</p> |
| <p>5.</p> | <p>Berangkat dari temuan diatas, Lantas apakah ada temuan lain dari sisi Timses Pradi-Afifah terkait kasus ketidaknetralisan ASN yang dilakukan Pasangan Idris - Imam?</p>                   | <p>Ya, seperti yang tadi kita obrolin, temen gua, Namanya si Abra itu, pas kampanye si Idris. Dia ini lagi ngekontrol orang antara lurah atau camat. Sebelum kampanye Abra ini dulu jabatannya Sekretaris Kecamatan. Tapi dengan memang orang itu, pastikan keliatan loyalitasnya si Abra ini dimata si Idris. Eh, ga Taunya pas pasca dari pemilihan itu, dia naik jabatan, yang awal Sekretaris Kecamatan terus naik jadi megang kedinasan. Kadis Disporyata.</p>   |
| <p>6.</p> | <p>Semisal ada, apakah tim sukses Pradi-Afifah melakukan semacam pelaporan atau penggugatan terkait ketidaknetralisan ASN</p>  | <p>Saya agak lupa si kalo untuk ini, tapi emang karena depok ini basenya si Idris dan IBH (dimana mereka PKS). Jadi mereka gampang untuk kesan-kesini. Kalau terkait laporang, saya udah sedikit lupa. Tapi tau kan kalau, kita berjalan di daerah sendiri (dominasi PKS di Depok) akan lebih luwes dalam bergerak ataupun mempengaruhi si bawahan-bawahannya.</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | yang dilakukan oleh pasangan Idris-Imam? |  |
|--|--|--|



## Transkrip Wawancara

Subjek : Wahyu Dwi Triyanto, S.Sos.

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Januari 2023

Lokasi : Kantor Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

| No. | Pertanyaan  | Jawaban  |
|-----|---|--|
| 1.  | Bagaimana dinamika yang terjadi dari sisi Masyarakat selaku audiens selama pra, hari pelaksana ataupun pasca dari PILWAKOT KOTA DEPOK 2020? | Sebenarnya dari pandangan KIPP Kota Depok, dinamika yang terjadi ya di Pilkada Kota Depok Tahun 2020. Kalo dari segi masyarakat, sebenarnya ada 2 golongan, yang pertama ada golongan yang sepaham dengan pemerintah sebelumnya (Pak Idris) dan ada juga yang sedikit kritis terhadap pemerintahan Pak Idris. Kenapa kritis, karena selama 1 periode pak idris di 2015-2020. Itu tuh ga ada signifikansinya perubahan gitu atau pembangunan ataupun apa. Macet juga masih. Terus kalo untuk yang membela pemerintah itu, karena itu loyalisnya Pak Idris atau pendukungnya Pak Idris. Karena loyalisnya Pak Idris, kalo dari pengamatan dan juga observasi dari teman-teman KIPP itu, sampai dari RT atau RW pun mereka terstruktur mereka. Jadi loyalisnya Pak Idris disusun dari tingkat bawah. Itu dari segi masyarakat, terus kalo dari segi organisasi kepemudaan, kalo organisasi kepemudaan ini cenderung netral, karena KIPP waktu tahun 2020 menjelang Pilkada (saat belum ada pengumuman calon Walikota), itu tuh kita sempet audiensi-audiensi antara OKP sekota Depok. Itu kita sebut atau kita namakan Fordep (Forum Depokra). Nah di Fordep itu, hampir semua organisasi kepemudaan tergabung disitu, kalo gasalah sekitar 30an lebih. |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>Termasuk organisasi besar seperti Ansor, Aspera, GPII, PMII, ada HMI, pun itu ikut di Forum Depokrasi itu. Nah Forum Depokrasi ini di canangkan untuk, kalo yang inisiasi, biasa dibilang dari teman KIPP juga. Karena ketua Fordepnya itu Sekjennya KIPP pada masa 2020-2022. Itu Sekjen KIPP yang merangkap menjadi ketua Fordep. Nah kalo dari segi, organisasi kepemudaan itu cenderung netral sebelum adanya nama yang mencalonkan menjadi walikota. Karena kita pula masih bisa berdiskusi secara umum gitu lah, untuk membicarakan pembangunan Kota Depok, kritik pemerintahan Kota Depok. Cumin Setelah berjalannya waktu, sama halnya diranah masyarakat, di organisasi kepemudaan juga, apa namanya, terkotakan gitu loh. Akhirnya di Fordep jalan, tetapi dibelakang organisasi kepemudaan ini mempunyai sikap masing-masing. Ada keberpihakan atau condong kepada salah satu calon. Contohnya kaya Anshor, Anshor itu lebih ke Pradi, trus ada GMNI itu lebih condong ke Pradi. Lalu dinamika setelah pilkada, itu malah cenderung ga ada dinamikalah, ya lempeng aja. Ketika KPU dan Bawaslu sudah menetapkan Idris jadi Pemenang, Yaudah, ga ada pergerakan massa yang menolak atau apa. Jadi ga ada clash atau benturan sama sekali.</p> |
| 2. | <p>Bagaimana dinamika yang terjadi dari sisi Pasangan Calon selama pra, hari pelaksana ataupun pasca dari PILWAKOT KOTA DEPOK</p> | <p>kalo kita KIPP, ya kita kan pemantau ya, dari segi pemantau, kita si cenderung mempunyai kedekatan ke KPU dan Bawaslu. Ketika KPU dan Bawaslu mempunyai visi dan misi untuk mensukseskan Pilkada terus menaikan partisipasi masyarakat, kita ikut andil disitu si, lebih condong KPU dan Bawaslu kalua</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>2020? terlebih para Pasangan Calon merupakan Petahana.</p> | <p>KIPPnya. Sebenarnya, dua-duanya itu mempunyai kekuatan yang sudah dibangun lah ya. Pak Idris mempunyai kekuatan saat dia menjadi Walikota, Pak Pradi juga mempunyai kekuataannya saat menjadi Wakil Walikota gitu kan. cuman disitu, secara kacamata ASN ya, ASN pun ga ada keterpihakan yang murni, ada yang menjadi anak buahnya Pak Idris, ada pula yang keberpihakan kepada Pak Pradi. Contohnya yang tadi Pak Sekda, Pak Sekda pun ga berpihak kepada salah satu Calon (Sekda pada masanya). Cumin dari segi lainnya, ya itu kita kan gabisa menilai juga ya. Karena netralitas ASN memang ga boleh keberpihakan. Cuma kalo dari segi pengaruh, kayanya kedua calon ini mempunyai pengaruh kayanya kedua calon ini mempunyai pengaruh di ASN, masing-masing. Namun begitu, kita gabisa mengukur, pengaruhnya Pak Idris di ASN mana dan pengaruhnya Pak Pradi di ASN mana. Itu gabisa kita lihat atau kita ukur, Cuma pasti dua-duanya punya pengaruh. Terus kalahnya Pak Pradi sebenarnya dia tuh gapunya structural didalam masyarakat yang support dia, contohnya kan kalo Pak Idris, yang kita sudah tanya dan cari tahu, sampai RT RW itu kan ada orangnya dia, tapi kalo Pak Pradi tuh ga ada disitu. Kalo Pak Pradi Cuma memanfaatkan partai-partai yang menjadi pendukung dia, kalo gasalah kan itu 7 banding 3 ya kan, 7 partai pendukung Pradi dan 3 Partai pendukung Idris kan. nah itu juga bisa kalah, secara kertas, sudah seharusnya koalisi gendut, Cuma bisa dikalahkan sama 3 partai.</p> |
|---|--|

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
|                  |   | <p>Dari sisi pengaruh orang bawahnya Pak Idris,</p> <p>Sebenarnya kalo loyalitas, kan RT RW kan termasuk ke perangkat pemerintahan harus netral dan lain-lain. Nah Cuma karena mereka kan punya keluarga dan sanak saudara, pengaruh yang besar itu mempengaruhi sanak keluarga dan saudara si. Kalo secara kasat mata, mungkin oke kita gabisa melihat, tapi secara pengaruh kan itu bisa dibuktikan di TPS gitu loh, inip pengaruhnya bener atau engga. Jadi kalo RT RW itu berpengaruh kita lihat saja di TPS, orang ini di RT ini banyak ga si pendukungnya Pak Idris gitu, tapi kalo secara kasat mata, yang benar-benar kita lihat, dia memang ga pernah kampanye dan lain-lain, Cuma pengaruh hiddennya atau tersembunyi itu besar juga. Bahkan gacuma RT RW sebernnya, OKP-OKP pun banyak, contohnya itu KNPI dan lain-lain. Itu kan banyak yang ke Pak Idris Orang-Orangnya. KNPI kan sudah legal dan itu memunyao anggaran sendiri dari Pemprov. Jadi dari situ bisa dilihat pengaruhnya ga Cuma di RT RW aja tapi organisasi-organisasi kepemudaan dan masyarakatnya juga punya pengaruh Pak Idris.</p> |
| <p><b>3.</b></p> | <p>Berdasarkan data dari sebuah Literatur, Keberlangsungan PILKADA SERENTAK 2020 terdapat pelanggaran-pelanggaran, yang tertinggi ialah ada Kasus Ketidaknetralitas ASN. Lantas, Apakah ada pelanggaran ASN dalam hal</p> | <p>Sebenernya ada, itu temuan bukan dari KIPP, Cuma itu ada laporan ke KIPP. Dan laporan tersebut bukan Cuma ke KIPP saja, tapi ke Bawaslu. Pelanggarannya itu kalua ga salah ada di perumahan ASN di Sawangan, disitu kan memang perumahan ASN, mau ga mau kan memang ASN semua. Nah disitu tuh sempet digelar pengajian atau kumpulan masyarakat di perumahan itu di masjid, nah itu mengundang Pak Walikota itu pas dimasa di sudah ditetapkan menjadi calon. Nah Cuma yang masuk ke KIPP kita tamping, lalu kita laporkan ke Bawaslu juga,</p>   |



|    |  |  |
|----|--|--|
|    | Netralitas pada PILWAKOT KOTA DEPOK 2020?  | Cuma Bawaslu juga kurang tindak karena kalau pelaporan-pelaporan itu kan butuh syarat. Nah itu yang kurang didapat, makannya laporan itu kurang direspon atau ditindaki oleh Bawaslu.  |
| 4. | Berdasarkan data yang beredar di platform informasi digital, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Depok terdapat melakukan Pelanggaran Netralitasnya berbentuk mengikuti kampanye selama PILWAKOT KOTA DEPOK 2020. Kemudian, Apa yang menjadi motif dari KABAN tersebut melakukan ketidaknetalisan selama PILWAKOT KOTA DEPOK 2020? | Kalau studi kasus ini ya, yang Kaban melakukan kampanye, kita kurang mendalami, Cuma kalo dari segi KIPP, berangkat dari kasus-kasus yang sudah ada atau yang pernah didenger KIPP. Biasanya ASN itu kan, beberapa ASN itu ada undangan secara resminya, pun itu tidak ada pelanggaran sama sekali kalau ada undangan secara resmi. Bukan mewakili instansi atau ap aitu gamasalah. Seperti Bawaslu dan KPU, Ketika di undang, kita gamasalah. Yang penting ada undangan resminya. Itu bukan berarti kita melanggar kode etik kita, ya karna kita diundang, mungkin disuruh mengawasi atau lainnya. mungkin di kepala Bagian ini disuruh untuk mengawasi disitu ada ASN atau tidak, itu pandangan dari kita ya dari segi pemantau, namun dari segi keberpihakan. Cuma kan kita gabisa membuktikan secara data ya. Kalau dari kita si itu aja.<br><br>Selama ada undangan resmi, itu tidak masalah. Namun semisal memang tidak ada undangan resmi dan terus kita terlibat secara sukarela. Nah baru itu melanggar asas-asasnya. |
| 5. | Berhubungan dengan Para Pasangan Calon yang merupakan Petahana. Seperti yang kita ketahui pula,  | Ya sebenarnya, bener si ya pernyataan itu. Ketika petahana maju, pasti dia sudah punya modal. Entah itu modal politik dilingkaran ASN, ataupun modal politik dilingkaran masyarakat. Itu pasti sudah punya modal.  |

|  |  |
|--|--|
| <p>seorang Petahana mempunyai sebuah previllage atau kelebihan dalam Kontestasi Politik, namun tidak dipungkiri pula terdapat peluang-peluang untuk melakukan penyelewengan previllage tersebut. Apakah kondisi ini yang menjadi faktor utama dari Kasus Ketidaketralitan ASN pada Pilwakot Kota Depok 2020?</p> | <p>Karena selama 5 tahun menjabat sebagai walikota atau kepala daerah, itu pasti mereka memikirkan lagi (apalagi periode pertama kan), gimana caranya saya itu, di periode selanjutnya bisa terpilih lagi. Makannya dia mempersiapkan modal-modal politik itu, kaya modal politik di masyarakat seperti menguasai structural di tingkat masyarakat ya kan, entah itu RT, RW, Organisasi Masyarakat atau apa itu kan kita harus punya modal disitu. Dengan cara kita, masukin orang-orang kita disitu. Terus kalau yang di ASN sama halnya kayanya begitu, selama 5 tahun. Ya kita harus pilih atau menetapkan ASN-ASN ini sesuai dengan apa yang menguntungkan dari Walikota itu. Nah kalo untuk di Depok sendiri itu bisa terjadi. Cuma ya kita gabisa berbicara secara langsung. Oh ya ternyata benar, Cuma prakteknya biasanya seperti itu. Walikota, ataupun Bupati, Gubernur yang masih menjabat 1 periode, pasti mempunyai inisiatif itu, mempersiapkan modal politik di lingkaran ASN. Karena pengaruh ASN itu sebenarnya besar ya, entah itu di lingkaran ASN sendiri ataupun di lingkaran masyarakat. Pasti kalau di ASN di lingkaran masyarakat, pasti didenger banget. Contohnya dia kepala bidang apa di birokrat. Pasti di lingkungan masyarakat dia jadi orang terpendang, pasti didenger, omongannya itu bisa dibilang diikuti oleh masyarakat. Nah makannya, pasti di semua walikota itu mempersiapkan itu. Mungkin kalo di Depok ini, karena dua-duanya ini incumbenya ini maju menjadi Walikota gitu kan. Itu tadi mungkin ASNnya pun, kebelah ada yang ke Pradi dan Idris. Contohnya yang tadi saya bilang itu, Pak Hardiono, karena Pak Hardiono itu Sekda. Dia secara personal, berbicara tidak</p> |
|--|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |  | <p>berpihak kepada 2 calon ini yak an. Entah itu secara personal atau professional ASN. Dan dia Ketika dia sudah tidak menjadi Sekda, pun dia ga terlihat diantara 2 pasangan calon ini, entah yang menang atau yang kalah, dia tidak ada didalam barisan itu. Malah di terjun politik dengan memilih partai baru yaitu Partai Nasdem. Nah kalo untuk Pilkada 2020 Kota Depok itu yang saya lihat, ASN itu tidak fokus kesalah satu calon saja. Karena duaduanya calon incumbent, dan ada representative secara netral yaitu Pak Hardiono (Sekda semasa itu). Jadi kayanya ga ke mobilisasi secara menyeluruh si Cuma beberapa yang bisa dibilang loyalisnya salah satu kandidat aja si.</p> <p>Kalo faktor ASN keberpihakan pasti kan, semua orang Ketika dia mempunyai posisi, pastikan dia akan mempertahankan posisi itu kan atau mungkin meningkatkan naik ke posisi lain. Kalo kita lihat dari segi ASN, ya hal itu lah yang menjadi alesan. Contohnya saya pegawai di dinas ini, Ketika saya ingin bertahan disini, saya harus memilih ini. Terus kalo sama mau naik jabatan, ya saya harus milih ini, jadi Ketika dia menang, saya pasti akan dinaikan (jabatan). Itu kan biasanya, kontrak-kontrak politiklah antara ASN-ASN. Atau bisa dibilang janji-janji politik dari Kepala Daerah, untuk menawarkan ke ASN “udah deh kalua kalian dukung saya gitu, nanti kalian saya akan naikan pangkatnya atau kalian akan saya promosikan jadi kepala Divisi atau apa, ada yang ditawarkan jadi sekda, sekretaris dewan” nah itu ada Cuma ya kita gabisa lihat lah ya. Tapi prakteknya</p> |
|--|---|---|

|           |  |  |
|-----------|--|--|
|           |  | <p>sebenarnya itu yang terjadi. Kenapa ASN itu biasanya loyal kepada salah satu calon. Semua pemerintahan itu ada relasi kuasa, entah itu di tingkat kota, bahkan dikelurahan itu bisa dibilang begitu. Cuma pasti kalo di desa-desa seperti itu, siapa yang milih kepala desa situ pasti dia akan menjadi perangkat desa begitupun yang di kota, Ketika pemilihan walikota, siapa yang dipilih dan dia memilih ya pasti ada janji-janji politik yang dijanjikan untuk ASN. Cuma kalo di kota depok kita gabisa melihat secara reel prakteknya gimana, Cuma kalo secara generalin, generalnya begitu. Pasti ada Cuma kita gabisa lihat studi kasusnya dimana si, siapa dan dimana. Itu belum bis akita lihat si, karenakan itu butuh penelitian dan juga ada pengakuan secara nyata dari pelaku ataupun walikota tersebut. jadi pasti ada hubungan timbal balik, tapi hal ini tidak bisa dilihat secara jelas.</p> |
| <p>6.</p> | <p>Selaku Organisasi Pemantau Pemilu, apakah pernah mendapati kasus Ketidaknetralisan ASN lainnya pada Pilwakot Kota Depok 2020?</p> | <p>Laporan-laporan si ada aja, oh ini ada ASN kok ikut kampanye, Cuma kan kembali lagi kita sebagai pemantau dan Bawaslu sebagai pengawas. Itu sulit untuk menindaklanjuti kalau, laporannya itu kurang jelas. Kalau Cuma via WA, ya gabis akita teruskan ke Bawaslu. Karena pelaporan pelanggaran administrasi atau pelanggaran kampanye, itu tuh harus lengkap. Harus adanya pelapor, terlapor, waktu, bukti foto atau apa. Cuma kalo kita Cuma dari mulut ke mulut. Tapi kalo laporan yang dari mulut ke mulut itu banyak laporan kalo itu ada. Contohnya, guru ini ikut, yakan dia di PNS tapi ikut kampanye salah satu calon, itu ada laporan kaya gitu. Ada juga pegawai pemda yang ikut kampanye. Tapi ya itu Cuma laporannya tidak bisa ditindaklanjuti karena</p>   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>laporannya hanya sebatas via WA dan lainnya. secara kasus memang ada, kalau kasus, bisa dipersentase sebenarnya ASN didepok yang melanggar netralitas ASN ya, bisa dibbilang, adalah 30% yang mana melalui laporan-laporan itu. Karena banyak laporan-laporan itu Cuma ga tertulis itu loha. Cuma ya itu, kita gabisa menindaki, kaya ada orang (ASN) ikut dia ASN ikut, itu banyak sebenarnya, Cuma gabisa kita buktikan.</p>   |
| 7. | <p>Semisal ada, Apa yang dilakukan KIPP dalam merespon Pelanggaran tersebut?</p>  | <p>Ya pastikan kita teruskan ke Bawaslu, yang berpihak menindak itu kan sebenarnya KPU. Bawaslu itu kan Cuma menerima laporan, melaporkan laporan dan menindaklanjuti laporang. Yang bisa menindak itu kan KPU. Makannya Ketika KIPP, pernah dapet laporan kampanye di perumahan ASN, ya kita rekap. Kita laporan ke Bawaslu, Cuma sampai sekarang laporannya itu nihil. ya karena kurang persyaratannya. Secara umum si prosesnya itu, kalo dari KIPP ada (laporan), ya kita laporkan ke Bawaslu, Bawaslu harusnya merespon, jika itu bisa di proses ya di proseskan ke KPU. Nanti yang bertindak itu KPU. Biasanya seperti itu.</p> |
| 8. | <p>Berdasarkan berbagai keuntungan yang didapati oleh Petahana, apakah ia menjadi sangat berpengaruh kepada Aparatur Sipil Negara selaku elemen yang ia bawahi ini?</p> | <p>Pasti berpengaruh, karenakan ya itu relasi kuasa itu kan ada lah ya, apalah skrupnya ASN itu kan, nyawanya dia tergantung sama pimpinanya kan. ia mau dipindah atau dinaikan (jabatannya) itu kan tergantung pimpinanya. Makannya, pengaruh dari walikota , bupati atau gubernur itu besar kepada ASN, karena kembali lagi, ASN itu bisa dibbilang ketergantungannya tinggi kepada pemimpin daerah itu.</p>  |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <p>9.</p> | <p>Sebagai lembaga Pemantau dari Pilwakot Kota Depok ini, tapi apakah KIPP ini sempat berkontribusi dalam menjaga Marwah dari Netralitas ASN?</p> | <p>Waktu itu lewat ini, lewat Pak Sekda (Hardiono) sebelum kita dilantik (secara visual). Sebelum itu kan kita pernah audiensi kepada Pak Hardiono, ya kita dilibatkan dalam menjaga netralitas, terus keterbukaan ASN pun disampaikan sama dia (Pak Hardiono), oh ternyata ASN begini nih, yang rawan ini yang ga rawan begini nih. Jadi KIPP coba ditelusuri ini ini ini. Kemarin itu beberapa dinas itu yang menjadi kerawanan, salah satunya ada dinas BKPSDM, salah satunya itu, dikarenakan, bisa dibidang dia kan polisinya ASN kan kalau dipemerintahan. Terus kalau Pak Sekda pun, mempersilahkan kita untuk kordinasi ke dinas-dinas untuk pemantauan, untuk mengawasi netralitas mereka. Jadi kalo dari segi keterlibatan, kita dipersilahkan oleh Pak Sekda. Cuma kan karena prakteknya KIPP kan organisasi non provit, jadi gabisa secara menyeluruh ataupun merata mengawalnya. Karena SDM di jajaran pengurus itu minim. Tapi secara keseluruhan perwakilan di kecamatan itu ad aitu untuk pemantauan pilkada. Cuma kalo dari segi penyelenggaraan, kita banyak dilibatkan oleh KPU dan Bawaslu dalam giat-giat meningkatkan partisipasi pemilih, peningkatan pengawasan, peningkatan pencegahan dan lainnya. kita dilibatkan menjadi undangan.</p> |
|-----------|---|--|

Dokumentasi

**Gambar 1.0 Wawancara dengan Willi Sumarlin, S.H. (Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Depok)**



**Gambar 2.0 Wawancara dengan Mochamad Fajri (Wakil Direktur Bidang Advokasi dan Hukum Tim Sukses Pradi Supriatna – Afifah Alia)**





**Gambar 3.0 Wawancara dengan Wahyu Dwi Triyanto, S.Sos. (Sekretaris  
Jendral Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Depok)**





***Daftar Riwayat Hidup Penulis***

Pada Skripsi ini dituliskan oleh pemuda bernama Bayu Dipo Pramono. Bayu Dipo Pramono atau akrab dipanggil Bayu ini. Tepat di Bogor, anak ini dilahirkan pada 3 Oktober 2001. Saat ini tinggal di Cilodong, Kota Depok. Dimana Bayu merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Supramo dan Evy Widayati, Bayu merupakan anak yang aktif dan riang. Bayu menempuh Pendidikan di SDN 01 Cilodong, dilanjutkan SMPN 6 Depok, lalu SMAN 8 Depok dan sekarang sedang menempuh di Universitas Nasional Program Studi Ilmu Politik.

Tentu dalam kehidupan kuliah ini, selain aktif kuliah, Bayu juga aktif mengikuti organisasi di lingkup Kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik sebagai Anggota Departemen Humas Infokom, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Nasional Rayon Gus Dur sebagai Wakil Ketua II (Eksternal), Tim Media Program Studi sebagai Editor.



Hasil Cek Turnitin

SKRIPSI BAYU

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

|          |  |               |
|----------|--|---------------|
| <b>1</b> | Submitted to Universitas Nasional<br>Student Paper | <b>2%</b>     |
| <b>2</b> | pt.scribd.com<br>Internet Source                   | <b>1%</b>     |
| <b>3</b> | kamila29address.blogspot.com<br>Internet Source    | <b>1%</b>     |
| <b>4</b> | www.repository.uinjkt.ac.id<br>Internet Source     | <b>1%</b>     |
| <b>5</b> | governmentjournal.org<br>Internet Source           | <b>1%</b>     |
| <b>6</b> | journal.unpacti.ac.id<br>Internet Source           | <b>1%</b>     |
| <b>7</b> | nanacentiaputri.blogspot.com<br>Internet Source    | <b>1%</b>     |
| <b>8</b> | www.researchgate.net<br>Internet Source            | <b>1%</b>     |
| <b>9</b> | Submitted to Udayana University<br>Student Paper   | <b>&lt;1%</b> |